

SDGs 2030 Masuk RPJMD Balikpapan 2025-2029



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,08/10/2024

JAKARTA – Pemerintah Kota Balikpapan siap menjadikan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 dan visi Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025-2029. “Bagaimana teknisnya, nanti akan diterjemahkan Bappeda Litbang,” kata Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir di sela-sela acara Konferensi Tahunan SDGs ke-7 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (7/10).

Pemkot Balikpapan hadir bersama sejumlah Pemkot/Pemkab se-Indonesia dalam kegiatan yang dibuka Wapres RI Ma’ruf Amin tersebut. Muzzakir mengatakan, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia hingga saat ini sebesar 62,5 persen. Masih ada deviasi 37,5 persen.

Sesuai arahan dari Wakil Presiden, lanjutnya, seluruh *stakeholder* termasuk Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk aksi nyata pencapaian pembangunan berkelanjutan 2030 dan visi Indonesia Emas 2045. Termasuk bagaimana berinovasi soal sumber pembiayaan SDGs. Ia menyatakan, SDGs merupakan prioritas utama dalam pembangunan 2025. Tentu ini menjadi bahan utama bagi Kota Balikpapan. ”Hal ini akan jadi prioritas dalam rencana pembangunan 2025-2029,” ucapnya.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kota akan terus berkomitmen melanjutkan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dan memastikan visi Indonesia Emas itu bisa tercapai.

Dengan mengutamakan dokumen perencanaan. Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan, dalam kaitan capaian SDGs sebenarnya Balikpapan juga sudah ada indikatornya.

”Dalam setiap dokumen perencanaan yang bersifat makro maupun menengah, bahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu ada kajian-kajian *backgroundnya* untuk SDGs tersebut,” kata Murni. Hal itu untuk memastikan program keberlanjutan pembangunan masuk dalam semua komponen perencanaan. Mengacu data Pemerintah Pusat, secara global SDGs ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2030. Di Indonesia angkanya sudah mencapai 62,5 persen, atau rata-rata global 17 persen di atas target dunia,” ungkapnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pentingnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dengan fokus pada industri hijau dan inovasi digital berkelanjutan.

Wapres mengungkapkan, bahwa Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari target SDGs, menyisakan deviasi 37,5 persen yang masih perlu dicapai sebelum tahun 2030. Ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mencapai target-target tersebut.

”Kita harus memastikan bahwa industri hijau dan inovasi digital memenuhi kebutuhan masa kini sekaligus menjawab tantangan dan aspirasi generasi mendatang,” pesannya. Dalam upaya pembiayaan program SDGs, Wapres mendorong sektor swasta dan filantropi untuk berpartisipasi lebih aktif, termasuk melalui *blended finance*. Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana amanah umat seperti zakat, infak, dan wakaf yang kini dikelola secara profesional dan berbasis digital.

Wapres mengingatkan bahwa pencapaian SDGs harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional 2025–2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Keberhasilan dalam mencapai target-target SDGs akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Emission pada 2060.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menekankan pentingnya inovasi, pendidikan berkualitas, dan pekerjaan hijau untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ia menyoroti peran generasi muda dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi hijau. **(ms/riz)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, SDGs 2030 Masuk RPJMD Balikpapan 2025-2029, 08/10/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (PP 111/2022), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP 111/2022, TPB bertujuan untuk:
 - a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
 - b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
 - c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
 - d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.